

## PENGAKUAN SILANG: SUATU KE- MUNGKINAN BARU DI SEMENAN- JUNG KOREA

Endi RUKMO\*

Tanggal 27 Juli 1983 genap 30 tahun Perjanjian Gencatan Senjata di Semenanjung Korea ditandatangani oleh Pasukan PBB dan Korea Utara beserta sekutunya Cina. Meskipun demikian situasi di semenanjung itu belum menunjukkan suatu perkembangan yang berarti. Ketegangan di daerah bebas militer tetap tinggi. Sementara Korea Utara meningkatkan persiapan perangnya, Korea Selatan terus memperkuat pertahanannya untuk menangkal serangan yang sewaktu-waktu dapat dilancarkan oleh pihak Utara. Provokasi militer terus dilakukan oleh pihak Korea Utara. Sejak perjanjian itu disepakati, lebih dari 76.000 kali pihak Korea Utara melakukan provokasi militer ke Selatan.<sup>1</sup> Sementara itu, sejak 1954 penyusupan militer Korea Utara yang berhasil digagalkan mencapai jumlah 44 kali.<sup>2</sup> Memang selama ini 419 pertemuan telah dilangsungkan di Panmunjom,<sup>3</sup> namun setiap kali pertemuan itu tidak mencapai suatu hasil.

Perjanjian Gencatan Senjata itu juga menyarankan diadakannya suatu konperensi untuk membicarakan penarikan mundur semua pasukan asing dan mencari penyelesaian damai masalah Korea tersebut. Namun sampai hari ini penyelesaian itu tak kunjung datang. Banyak usulan penyelesaian telah diajukan baik oleh pihak Korea Selatan maupun pihak Korea Utara, tetapi yang terjadi hanyalah pihak yang satu menolak usul pihak yang lain dan mengajukan usulan tandingan yang selalu ditolak lagi. Misalnya, usul 14 pasal yang diajukan oleh pihak Korea Selatan pada Konperensi Jenewa tahun 1954, serta-

\*Staf CSIS.

<sup>1</sup>Lihat "Herald Observers Aniversary of Armistice Agreement," *FBIS, ASPAC*, 27 Juli 1983, hal. E2.

<sup>2</sup>*Korea Newsreview*, 25 Juni 1983, hal. 6.

merta ditolak tidak saja oleh pihak Korea Selatan, tetapi juga oleh Cina dan Uni Soviet. Kemudian usul Korea Utara mengenai pembentukan "Federasi Korea" yang diajukan sepuluh kali selama tiga tahun (1960-1963),<sup>1</sup> dan yang dipertegas lagi pada Kongres Partai Pekerja Korea ke-6 bulan Oktober 1980, semuanya ditolak oleh pihak Korea Selatan, karena semua usul yang diajukan Korea Utara itu menghendaki penarikan mundur pasukan PBB dari Korea Selatan sebagai pra-kondisi perundingan. Persyaratan itu selalu ditolak Korea Selatan karena pihaknya masih curiga terhadap ambisi Korea Utara untuk menyatukan kembali Korea dengan jalan kekerasan dan menerapkan ideologi komunis.

Tulisan ini secara singkat akan mengulas faktor-faktor yang menghambat usaha penyatuan kembali bangsa Korea yang terpisah dan pertimbangan-pertimbangan baru yang muncul, khususnya pada pihak Korea Selatan, yang kelihatan lebih bersifat realistik.

#### FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT

Penyatuan kembali bangsa Korea yang terpisah itu kiranya sulit dicapai karena sejak awal negara-negara besar sudah terlibat di dalamnya, dan tampaknya mereka itu memang tidak menginginkan adanya penyatuan kembali. Negara-negara besar itu, khususnya Amerika Serikat, Uni Soviet, Cina dan Jepang, memandang Semenanjung Korea sebagai suatu wilayah yang vital dan strategis dan berusaha mempertahankan pengaruhnya di wilayah itu demi kepentingan strategi (untuk Amerika Serikat dan Uni Soviet) dan kepentingan keamanan (untuk Cina dan Jepang).

Amerika Serikat, misalnya, setelah mengusulkan garis pemisah 38° Lintang Utara antara wilayah Korea Utara dan Selatan, membawa masalah itu ke PBB, yang kemudian menyelenggarakan pemilihan umum di Korea Selatan dan pada bulan Agustus 1948 terbentuklah Republik Korea Selatan. Beberapa bulan kemudian (September 1948) di Utara juga terbentuk Republik Demokrasi Rakyat Korea yang disponsori oleh Uni Soviet.

Sesudah terbentuknya Republik Korea itu, Amerika Serikat menganggap bahwa tugasnya di wilayah itu sudah selesai dan tidak ada gunanya mempertahankan kehadiran militernya di situ, karena tidak mempunyai arti strategis bagi kepentingan Amerika Serikat. Oleh karenanya Pemerintah Washington memutuskan untuk menarik mundur seluruh pasukannya dari Korea Selatan pada bulan Juni 1948.<sup>2</sup> Kepergian pasukan Amerika itu agaknya dimanfaat-

<sup>1</sup>Srivastava, M.P., *The Korean Conflict, Search for Unification*.

Tae Hwan-kwak, "US-Korea Security Relations," *The Journal of East Asian Affairs*, Fall/

kan oleh pihak Korea Utara untuk mempersiapkan serangannya ke Selatan dalam rangka menyatukan kembali wilayah yang terpisah itu dengan jalan kekerasan. Pemerintah Washington baru sadar bahwa keputusannya itu keliru, ketika pasukan Korea Utara mengadakan invasi ke Korea Selatan pada tanggal 25 Juni 1950. Oleh sebab itu Amerika Serikat segera mengirim kembali pasukannya untuk mempertahankan Korea Selatan.

Sejak itu Amerika Serikat mengakui arti strategis wilayah Korea terutama bagi kepentingan Amerika Serikat di Pasifik Barat dan bagi kepentingan sekutu-sekutunya di kawasan itu. Dalam Perjanjian Pertahanan Timbal-Balik antara Amerika Serikat dan Korea Selatan tahun 1954, yang sampai sekarang merupakan dasar kuat hubungan keamanan antara mereka, antara lain dikatakan bahwa Amerika Serikat sangat terikat janji untuk mempertahankan Korea Selatan.<sup>1</sup> Dalam komunikasi-komunikasi bersama mengenai hubungan keamanan antara Pemerintah Seoul dan Pemerintah Washington tahun 1965, 1966 dan 1968, Amerika Serikat mengulang kembali komitmennya untuk tetap menempatkan pasukan daratnya di Korea Selatan. Namun pada akhir tahun 1960-an Amerika Serikat menilai kembali kebijakannya di dunia, terutama disebabkan oleh peperangan Vietnam yang berlarut-larut dan kesulitan-kesulitan di dalam negeri seperti: inflasi, defisit neraca pembayaran, kritikan-kritikan opini umum dan oposisi Kongres. Penilaian kembali kebijakan keamanan Amerika Serikat itu terungkap ketika pada tanggal 25 Juli 1969 Presiden Nixon menyatakan keinginannya untuk mengurangi kehadiran militernya di Asia dan mendorong negara-negara sekutunya di kawasan ini untuk meningkatkan kemampuan pertahanannya sendiri. Pernyataan ini kini dikenal sebagai Doktrin Nixon.

Doktrin itu menjadi kenyataan ketika tanggal 31 Desember 1973 Pemerintah Amerika Serikat menarik 24.000 pasukan daratnya dari Korea Selatan.<sup>2</sup> Karena "Vietnam Syndrome" dan kesulitan ekonomi yang semakin parah di Amerika Serikat, Kongres mendesak Presiden Carter untuk menarik lagi pasukan Amerika Serikat dari Korea Selatan. Carter setuju dengan pendapat Kongres itu dan merencanakan untuk menarik mundur 26.000 pasukan daratnya mulai tahun 1979 hingga 1982. Namun setelah Carter mengadakan kunjungan ke Korea Selatan tanggal 29 Juni - 1 Juli 1979 dan mengetahui lebih jelas perkembangan yang terjadi di semenanjung itu, akhirnya ia mencabut kembali rencana tersebut. Setelah Reagan muncul sebagai pemenang di tahun 1980, pemerintahnya justru menegaskan kembali komitmen Amerika Serikat kepada Korea Selatan.

---

<sup>1</sup>*Ibid.*, hal. 263.

Sementara itu Uni Soviet sejak dahulu memang sudah tertarik untuk menguasai semenanjung itu terutama untuk kepentingan angkatan lautnya dalam mencari pangkalan yang tidak membeku pada musim dingin. Pangkalan-pangkalan seperti itu akan penting sekali bagi kebijakan strategisnya di kawasan Pasifik Barat, terutama dalam menghadapi kekuatan laut Amerika Serikat. Dalam usahanya mencari pangkalan itu, sejak tahun 1979 Uni Soviet berhasil mendapatkan konsesi dari Korea Utara untuk menggunakan fasilitas Pelabuhan Najin,<sup>1</sup> yang tidak saja digunakan untuk kepentingan militer, tetapi juga untuk angkutan barang-barang Uni Soviet dari Siberia seperti barang-barang kimia, batu bara, pupuk dan lain-lain ke luar negeri.<sup>2</sup>

Dilihat secara geostrategis, Semenanjung Korea juga penting bagi Uni Soviet terutama bagi kepentingan keamanan teritorialnya. Uni Soviet khawatir akan ancaman nuklir Amerika Serikat, yang sewaktu-waktu bila pecah perang nuklir dapat diluncurkan dari wilayah Korea Selatan. Menurut anggapan Moskwa dan Pyongyang, Amerika Serikat menempatkan sekitar 1.000 senjata nuklir jarak menengah di Korea Selatan,<sup>3</sup> meskipun hal itu selalu dibantah baik oleh pihak Amerika Serikat maupun Korea Selatan.

Bagi Cina dan Jepang Semenanjung Korea sudah sejak berabad-abad yang lalu menjadi obyek perebutan. Mereka masing-masing melihat betapa vitalnya wilayah itu. Misalnya secara tradisional Jepang menganggap semenanjung itu sebagai "a dagger pointed at the heart of Japan," dan oleh Cina semenanjung itu dianggap sebagai "a hammer ready to strike at the head of China," atau "a lip to protect China's teeth."<sup>4</sup>

Sebenarnya pembagian wilayah Korea itu berawal pada abad ke-16, ketika Jepang yang sudah menguasai sebagian dari wilayah Korea mengusulkan agar diadakan perjanjian pembagian wilayah Korea dengan Cina yang mendukung Kerajaan Korea. Namun perundingan yang diadakan pada waktu itu gagal. Baru tiga abad kemudian, yaitu bulan Juli 1894 ketika Inggris sebagai penengah mengusulkan kepada pihak Cina dan Jepang yang sedang berperang memperebutkan semenanjung itu agar membagi dua saja wilayah yang dipersengketakan itu. Diperkirakan usul pembagian tersebut hampir sama dengan pembagian sekarang ini, yaitu sekitar garis paralel 38°. Pihak Cina pada waktu itu menerima usul itu dengan persyaratan bahwa Seoul sebagai ibukota Korea dimasukkan ke dalam daerah yang dikuasainya. Tetapi syarat itu di-

<sup>1</sup>FBIS, ASPAC, 5 Agustus 1983, hal. E3.

<sup>2</sup>Srivastava, M.P., *op. cit.*, hal. 55.

<sup>3</sup>Lihat "South Korea-US Defense Treaty Assailed," FBIS, ASPAC, 9 Agustus 1983, hal. D3.

<sup>4</sup>Hak Joon-kim, *The Unification Policy of South and North Korea - A Comparative Study*,

tolak Jepang, dengan alasan bahwa kemenangan perang sebenarnya sudah di tangan Jepang. Dan memang pada tahun 1895 pasukan Jepang dengan mudah mengalahkan Cina, sehingga berakhirilah pengaruh Cina di seluruh Semenanjung Korea itu.<sup>1</sup>

Perang Korea yang berlangsung dari tahun 1950-1953 mengakibatkan bertambah luasnya keterlibatan negara-negara besar di dalam konflik itu. Memang pada mulanya hanya Amerika Serikat dan Uni Soviet yang telah mendorong terciptanya dua Korea dan masing-masing menganut sistem politik dan ekonomi sesuai dengan negara pendukungnya. Tetapi setelah perang itu Cina yang terlibat langsung dalam peperangan, menjadi faktor penting di dalam konflik, sehingga pada waktu itu tercipta dua persekutuan yang saling berlawanan yaitu persekutuan antara Uni Soviet, Cina dan Korea Utara di satu pihak dan Amerika Serikat, Jepang dan Korea Selatan di lain pihak. Bersamaan dengan Perang Dingin yang semakin memanas, usaha-usaha ke arah penyatuan kembali bangsa Korea yang terpisah itu semakin tidak membawa hasil.

Ada dua faktor penting yang menyebabkan usaha penyatuan kembali itu selalu gagal. *Pertama*, adanya realitas dari situasi di Korea sekarang ini. Di sana terdapat dua sistem nilai, ideologi, dan sistem ekonomi dan politik yang tidak saja berbeda tetapi juga saling bertentangan. *Kedua*, adanya kepentingan yang bertentangan di antara negara-negara besar yang terlibat di dalam konflik Korea itu. Kepentingan-kepentingan itu jelas akan selalu menyulitkan usaha penyatuan kembali kecuali bila ada penyesuaian-penyesuaian dan konsesi-konsesi di antara negara-negara besar tersebut.

## PEMIKIRAN BARU MENGENAI PENGAKUAN SILANG

Menyadari sulitnya mencapai penyatuan kembali itu, Pemerintah Korea Selatan, sementara tetap meneruskan kebijakan penyatuan kembali, mulai mempertimbangkan suatu langkah baru yang tampaknya lebih realistis untuk situasi sekarang ini. Menteri Luar Negeri Korea Selatan, Lee Bum-suk, mengatakan di Defense College pada awal Juli 1983 bahwa suatu *pengakuan silang* (cross recognition) atas Korea Selatan dan Korea Utara oleh negara-negara besar merupakan kemungkinan yang lebih masuk akal untuk saat ini. Oleh karenanya, Korea Selatan sedang mempertimbangkan suatu kebijakan baru -- *Nordpolitik* -- dalam rangka menormalisasi hubungan dengan Uni Soviet dan Cina yang menjadi pendukung Korea Utara.<sup>2</sup>

<sup>1</sup>John Albert White, *The Diplomacy of the Russo-Japanese War*, (Princeton: Princeton University Press, 1964), hal. 316-333.

Gagasan mengenai kebijakan baru itu sebenarnya merupakan salah satu pertimbangan yang juga dipikirkan oleh para pemimpin Amerika Serikat, khususnya untuk mencari konsesi-konsesi dari Uni Soviet dan Cina. Bahkan Jepang yang menganggap pentingnya kehadiran pasukan Amerika Serikat di Korea Selatan pada awal tahun 1970-an sudah melihat kesulitan usaha penyatuan kembali itu, dan telah melihat adanya status quo di Semenanjung Korea. PM Kakuei Tanaka, misalnya, pernah mengatakan bahwa Jepang tidak bisa, tetapi mengakui bahwa ada *dua Korea* di semenanjung itu dan ingin menjalin hubungan diplomatik dengan keduanya.<sup>1</sup>

Meskipun masih terdapat banyak hambatan mengenai pengakuan silang itu, tampak gejala-gejala baru yang bisa mengarah pada suatu penyesuaian. Perkembangan yang terjadi pada bulan-bulan belakangan ini dapat menunjukkan adanya gejala-gejala itu. Misalnya setelah Presiden Mesir, Hosni Mubarak, kembali dari Korea Utara dan singgah di Tokyo tanggal 6 April 1983, ia mengatakan kepada PM Nakasone bahwa Kim Il-sung ingin sekali meningkatkan hubungan dengan Amerika Serikat.<sup>2</sup> Rupanya pesan Kim Il-sung itu ditanggapi positif oleh Nakasone. Sebagai suatu petunjuk, tidak lama sesudah itu, untuk pertama kalinya Pemerintah Jepang mengizinkan suatu delegasi Korea Utara menghadiri Konferensi Ahli Hukum Afro-Asia ke-23 yang berlangsung di Tokyo tanggal 16-20 Mei 1983.<sup>3</sup> Kejadian ini diikuti dengan diizinkan *Chuji Kuno*, seorang anggota Parlemen dan LDP serta Presiden Liga Parlemen untuk Persahabatan Jepang-Korea Utara berkunjung ke Korea Utara bulan Juli 1983.<sup>4</sup>

Tanggapan positif Jepang itu kelihatannya tidak terlepas dari perkembangan yang baru saja terjadi di Korea Selatan. Karena terjadinya suatu pembajakan pesawat penumpang Cina tanggal 5 Mei 1983, suatu delegasi resmi Pemerintah Cina dikirimkan ke Seoul untuk merundingkan pengembalian penumpang dan pesawat yang dibajak itu. Perundingan tersebut akhirnya menghasilkan suatu pernyataan bersama 9 pasal yang ditandatangani Ketua Delegasi masing-masing atas nama Republik Korea dan Republik Rakyat Cina.<sup>5</sup> Bagi Korea Selatan peristiwa itu dianggap tahap awal Cina mengakui keberadaannya (eksistensinya), yang sebelumnya tidak pernah terjadi.

<sup>1</sup>Gavan McCormack, "The Reunification of Korea: Problems and Prospects," *Pacific Affairs*, Vol. 55, No. 1, hal. 25.

<sup>2</sup>Lihat "Shifts in DPRK, PRC Diplomacy Examined," *FBIS*, ASPAC, 18 April 1983, hal. E1.

<sup>3</sup>Lihat "ROK, DPRK Delegates Attend Tokyo Legal Forum," *FBIS*, ASPAC, 16 Mei 1983, hal. C3.

<sup>4</sup>*FBIS*, ASPAC, 12 Juli 1983, hal. C2.

<sup>5</sup>McCormack, 23 Mei 1983, hal. 9, dan Korea News Service, 14 Mei 1983, hal. 7.

Namun perkembangan selanjutnya tidak semulus seperti yang diharapkan. "Diplomasi pembajakan" itu tidak memberikan akibat positif lebih lanjut. Dalam konperensi tahunan UNDP yang dilangsungkan di Qingdu dan Hangshou dari tanggal 20 Mei - 9 Juni 1983, Pemerintah Cina tidak memberikan visa masuk kepada delegasi Korea Selatan yang sejak lama telah menjadi anggota UNDP.<sup>1</sup> Kemungkinan hal itu disebabkan oleh protes dari pihak Korea Utara, yang memang merasa tidak senang akan pendekatan antara Cina dan Korea Selatan itu. Sikap Cina itu sangat menyakitkan pihak Korea Selatan. Dalam kasus larinya Mig-21 beserta pilotnya tanggal 7 Agustus 1983 dari Cina ke Korea Selatan, misalnya, Pemerintah Seoul mengirim pilotnya ke Taiwan, meskipun secara resmi ingin membicarakan soal pengembalian pesawatnya dengan pihak Beijing.

Gagasan pengakuan silang itu tidak hanya dibicarakan di Jepang, tetapi juga di Amerika Serikat. Di dalam suatu "Congressional hearing" tanggal 13 Juli 1983 dan seminar yang diadakan oleh "Center for the Study of Foreign Affairs," yang selama ini menjadi "think-tank"-nya Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, pertimbangan kebijakan baru Pemerintah Korea Selatan itu menjadi pokok pembicaraan. Di dalam hearing itu, misalnya, para peserta diskusi menyarankan agar Amerika Serikat menjalin hubungan dagang tidak langsung dengan Korea Utara guna mengurangi ketegangan di Semenanjung Korea. Seorang pejabat senior Amerika Serikat yang membidangi masalah Asia Timur mengatakan bahwa Amerika Serikat mungkin akan mencabut larangan berdagang dengan Korea Utara, jika Uni Soviet dan Cina melakukan hal sama terhadap Korea Selatan.<sup>2</sup> Meskipun selama ini Amerika Serikat tampaknya masih bersikap keras terhadap Korea Utara, sebenarnya negara itu juga telah mempertimbangkan *pendekatan baru* dengan pihak Korea Utara. Misalnya, Korea Utara telah diizinkan untuk membentuk Tim Pengamat di PBB sejak tahun 1973 dan sejak tahun 1977 Pemerintah Amerika Serikat telah mencabut larangan bagi warga Amerika Serikat untuk berkunjung ke negara itu.<sup>3</sup>

Perubahan-perubahan sikap yang serupa terjadi juga di Uni Soviet dan kemungkinan di Cina. Menurut Prof. Donald Zagoria<sup>4</sup> Uni Soviet tidak ingin melihat perang baru di Semenanjung Korea, karena kekalahan Korea Utara akan mempunyai dampak negatif bagi citra Uni Soviet khususnya di mata sekutu-sekutu lainnya. Sebaliknya kemungkinan kemenangan Korea Utara

<sup>1</sup>FBIS, ASPAC, 12 Juli 1983, hal. E1.

<sup>2</sup>Korea Newsreview, 30 Juli 1983, hal. 7.

<sup>3</sup>FBIS, ASPAC, 28 Juli 1983, hal. E1.

<sup>4</sup>Zagoria, S. Donald (ed.), *Soviet Policy in East Asia*, (New Haven: Yale University Press,

akan lebih mendekatkan negara itu kepada Cina dan menjauhkannya dari Uni Soviet. Pendekatan antara Cina dan Korea Utara mulai terungkap di tahun 1970-an. Peningkatan hubungan ini bukan saja tampak dari semakin seringnya kunjung-mengunjung antara pemimpin kedua negara, tetapi juga karena selama ini hanyalah Cina yang selalu berpendirian bahwa rezim Pyongyang adalah satu-satunya penguasa yang sah di Semenanjung Korea.

Sementara itu meskipun secara resmi Uni Soviet mendukung posisi Korea Utara mengenai penyatuan kembali, negara ini menyangsikan keberhasilan ambisi Korea Utara mengingat realitas yang ada dewasa ini. Mengam Wakil Menteri Luar Negeri Uni Soviet, Kapitsa, pernah mengatakan secara resmi di Tokyo tanggal 14 April 1983 antara lain bahwa Uni Soviet tidak ingin mengakui Korea Selatan dan Moskwa menolak apa yang disebut pengakuan silang itu.<sup>1</sup> Tetapi secara pribadi, para cendekiawan Soviet menyatakan bahwa *koeksistensi damai* antara dua Korea seperti halnya *dua Jerman* akan lebih menguntungkan kepentingan Uni Soviet di kawasan itu, karena situasi seperti itu akan membuat Korea Utara tetap condong kepada Uni Soviet.<sup>2</sup>

Demikian pula Cina, untuk situasi seperti sekarang ini, tidak ingin berperang melawan Amerika Serikat, terutama karena kepentingan pembangunan ekonomi dalam negerinya sangat mengharapkan bantuan dari negara-negara Barat khususnya dari Amerika Serikat dan Jepang. Ralp N. Clough juga mengatakan pada suatu hearing tentang kebijakan Uni Soviet di Asia Utara yang disponsori oleh Sub-Komite untuk Asia dan Pasifik DPR Amerika Serikat tanggal 21 Juli bahwa Uni Soviet menolak mensuplai perlengkapan militer modern kepada Korea Utara karena negara itu tidak menginginkan suatu perang baru di kawasan itu.<sup>3</sup> Perubahan sikap Uni Soviet dan Cina di satu pihak dan Amerika Serikat di lain pihak mungkin akan mengubah situasi tegang di Semenanjung Korea.

## PENUTUP

Penolakan resmi Uni Soviet itu mungkin karena pihak Korea Utara dengan tegas menentang prinsip pembagian dua Korea itu secara permanen. Dalam rangka memperingati 30 tahun Perjanjian Gencatan Senjata di Pyongyang

<sup>1</sup>Antara, 15 April 1983.

<sup>2</sup>Ralp N. Clough, "The Soviet Union and Two Korea," di dalam buku Zagoria S. Donald (ed), *op. cit.*, hal. 180.

<sup>3</sup>Lihat "Government Weighs Balanced Contact with World Powers" *ERIS ASBAC*, 28 JUN 1983, hal. 1.

tanggal 27 Juli 1983 PM Korea Utara, Yi Chong-ok, mengatakan bahwa ide "dua Korea" dari pihak Korea Selatan dan Amerika Serikat itu semata-mata merupakan usaha provokasi baru terhadap Korea Utara.<sup>1</sup> Dalam hal ini baik Cina maupun Uni Soviet ingin tetap menjalin hubungan yang baik dengan Korea Utara tidak saja karena letaknya yang strategis, tetapi juga karena masing-masing ingin mempertahankan pengaruhnya di wilayah itu. Di sini sebenarnya taruhan Korea Utara cukup besar untuk membuat kedua negara besar itu mau tetap berhubungan baik dengannya.

Kesempatan seperti itu digunakan Korea Utara sampai sekarang. Sebagai contoh, belum lama ini Pemerintah Pyongyang dan Pemerintah Beijing menandatangani suatu perjanjian penggunaan Pelabuhan Chongjin, suatu tempat yang cukup strategis di Pantai Korea Utara di Laut Jepang.<sup>2</sup> Kejadian itu akan dapat mengurangi rasa kesal Cina kepada Korea Utara yang telah mengizinkan Uni Soviet menggunakan fasilitas pelabuhan di Najin.

Tetapi rupanya Korea Utara tidak mau melihat kenyataan baru yang sedang terjadi di Korea Selatan. Korea Selatan mempertimbangkan kebijakan baru itu karena saat inilah suatu kesempatan baik untuk mencari dukungan internasional yang lebih besar. Dengan pesatnya pertumbuhan ekonomi, sejak tahun 1980 Korea Selatan berusaha meningkatkan peranannya di luar negeri. Kerja sama di bidang ekonomi, seperti penanaman modal dan perdagangan dan di bidang kebudayaan dengan negara-negara lain terus ditingkatkan. Meskipun belum menjadi anggota PBB, Korea Selatan telah menjadi anggota dari delapan organisasi PBB dan 15 organisasi internasional lainnya.<sup>3</sup>

Sementara itu negara ini juga akan menjadi tuan rumah beberapa pertemuan internasional yang penting seperti pertemuan IPU bulan Oktober 1983, sidang umum IMF tahun 1984, Asian Games tahun 1986 dan Olympiade tahun 1988. Semakin berperannya Korea Selatan di forum-forum internasional itu bisa membuat Korea Utara semakin tidak berhasil meyakinkan baik Moskwa maupun Beijing untuk tidak hadir di dalam pertemuan-pertemuan yang diselenggarakan di Seoul, sehingga mau tidak mau pihak Korea Utara akhirnya harus mengakui kenyataan baru itu dan menyesuaikan diri.

<sup>1</sup>Lihat "Yi Chong-ok Banquet Address," *FBIS*, ASPAC, 28 Juli 1983, hal. D3.

<sup>2</sup>Lihat "North Korea-China Seaport Agreement Viewed," *FBIS*, ASPAC, 5 Agustus 1983, hal. E3.